

BAB V

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan temuan lapangan dan analisis mendalam yang disusun secara sistematis untuk menjawab dua rumusan masalah utama dalam penelitian ini. Bagian pertama membedah mekanisme pembentukan koalisi antar-partai politik pada Pilkada 2024 di Kabupaten Lamongan beserta faktor-faktor determinan yang memengaruhi keputusan parpol untuk berkoalisi. Bagian kedua menganalisis strategi kemenangan yang diterapkan oleh masing-masing poros koalisi serta bagaimana strategi tersebut berkelindan dengan dinamika struktural koalisi yang terbentuk. Seluruh temuan diinterpretasikan dengan mengintegrasikan data primer hasil wawancara mendalam bersama informan kunci data sekunder studi dokumentasi, serta pisau analisis teori koalisi dan perilaku politik.

5.1 Mekanisme Pembentukan Koalisi Antar-Partai Politik dan Faktor Determinannya

Pembentukan koalisi partai politik dalam Pilkada Kabupaten Lamongan 2024 menyajikan anomali sekaligus dinamika yang menarik dalam studi kartelisasi politik lokal. Melalui penelusuran empiris, mekanisme koalisi bergerak dalam dua dimensi utama: dimensi formal-institusional yang diatur oleh regulasi kepemiluan, dan dimensi informal-taktis yang digerakkan oleh kompromi elite serta restu patron keagamaan lokal.

5.1.1 Impak Regulasi Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Struktur Koalisi

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024, konseptualisasi koalisi di Lamongan mengacu pada syarat ambang batas parlemen tradisional sebesar 20% kursi DPRD (minimal 10 kursi). Berdasarkan konversi kursi hasil Pileg 2024, hanya PKB (12 kursi) yang secara legal-formal memiliki tiket mandiri untuk mengusung pasangan calon tanpa koalisi. Partai besar lainnya seperti Partai Golkar (8 kursi), PDI Perjuangan (7 kursi), dan Partai Gerindra (6 kursi) secara struktural diwajibkan untuk berkoalisi.

Namun, pasca-Putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan menjadi 6,5% dari akumulasi suara sah untuk kabupaten dengan jumlah DPT di atas 1 juta jiwa, terjadi pergeseran aturan main (*rule of the game*). Secara teoretis, penurunan ambang batas ini membuka peluang terciptanya multi-poros (3 hingga 4 pasangan calon), mengingat PKB, Golkar, PDIP, dan Gerindra masing-masing mengantongi suara sah di atas 12,5% (melampaui syarat minimal 6,5% atau sekitar 51.967 suara). Kendati demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa konfigurasi politik di Lamongan justru mengalami konvergensi ekstrem ke dalam pola biner (*head-to-head*) antara Poros Koalisi Lamongan Megilan (KLM) dan Poros Koalisi Lamongan Bagus (KLB).

Kondisi ini membuktikan bekerjanya teori Kelembagaan Pilihan Rasional (*Rational Choice Institutionalism*). Partai politik di Lamongan tidak serta-merta mengeksploitasi kelonggaran regulasi untuk maju mandiri demi ego kelembagaan.

Sebaliknya, mereka melakukan kalkulasi biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*). Mengingat tingginya biaya logistik politik dan besarnya risiko kekalahan dalam sistem mayoritas pluralitas (*plurality system*), parpol memilih untuk melakukan kartelisasi dan pemusatan sumber daya ke dalam dua poros besar guna mengamankan kepastian kemenangan.

5.1.2 Tahapan Mekanisme Pembentukan Koalisi: Formal dan Informal

Proses pembentukan koalisi di Kabupaten Lamongan melewati tahapan berlapis yang mengombinasikan mekanisme **bottom-up** dan **top-down**, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **Penjaringan Terbuka Tingkat Lokal (Formal):** Setiap parpol di tingkat daerah (DPC/DPD) membuka Desk Pilkada untuk melakukan pendaftaran dan seleksi administratif terhadap bakal calon bupati/wakil bupati. Proses ini dilengkapi dengan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta pemaparan visi-misi. Penjaringan lokal merupakan pintu masuk awal yang disediakan oleh partai politik di tingkat kabupaten (DPC/DPD) untuk menyerap aspirasi bakal calon. Mekanisme ini mencakup pengumuman pendaftaran, penyerahan berkas administrasi, hingga pelaksanaan *fit and proper test* serta penyampaian visi-misi di hadapan pengurus daerah.

Aktor Eksekutor: Desk Pilkada DPC/DPD Partai Politik di Kabupaten Lamongan (seperti PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN, PKS). Kasus Empiris: Bakal calon petahana Yuhronur Efendi maupun penantang Abdul Ghofur secara formal mendaftar dan mengikuti seluruh

tahapan administratif di tingkat DPC/DPD sebelum berkas usulan dikirimkan ke tingkat provinsi dan pusat.

2. **Diplomasi Warung Kopi dan Lobi Elite (Informal):** Merupakan tahapan paling krusial di mana para ketua partai politik melakukan pertemuan informal (*coffee diplomacy*) untuk menjajaki kesamaan kepentingan ekonomi-politik, komposisi pembagian kekuasaan (*power-sharing*), dan kecocokan figur figur calon. Di balik sekat-sekat formal, keputusan-keputusan strategis terkait pembentukan poros, penyelarasan kepentingan, kompromi finansial (*cost-sharing*), hingga pembagian kekuasaan (*power-sharing*) disepakati melalui ruang-ruang informal. Istilah 'Coffee Diplomacy' menggambarkan fleksibilitas komunikasi elite politik lokal yang cair di luar koridor resmi.

Aktor Eksekutor: Pimpinan/Ketua DPC/DPD Partai Politik lintas poros.

Kasus Empiris: Pertemuan-pertemuan tatap muka antar-ketua partai di kafe dan rumah makan di Lamongan yang menghasilkan kesepakatan penunjukan struktur Tim Pemenangan KLM (Ketua dari Gerindra, Sekretaris dari PDI-P, Bendahara dari Golkar) serta negosiasi alokasi logistik kampanye.

3. **Sowan Masyayikh dan Patronase Kultural (Informal):** Mengingat kultur Lamongan yang religius, para aktor politik wajib melakukan sowan ke pondok-pondok pesantren besar untuk mendapatkan restu informal dari para Kiai sepuh (Masyayikh) NU dan tokoh Muhammadiyah. Arah restu Kiai menjadi jangkar psikologis arah koalisi parpol. Mekanisme informal

kultural yang menjadi penentu utama legitimasi sosial politik di daerah basis Islam tradisional seperti Lamongan. Sowan Masyayikh bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan strategi perolehan restu kultural (cultural backing) dari pimpinan pesantren dan Kiai Sepuh untuk mengamankan jangkar psikologis pemilih NU dan Muhammadiyah.

Aktor Eksekutor: Pasangan Calon (Yuhronur Efendi - Dirham Aksara dan Abdul Ghofur - Firosha Shalati) didampingi elite parpol pengusung. Kasus Empiris: Kunjungan berkala dan sowan politik ke pimpinan Pondok Pesantren Sunan Drajat, Pondok Pesantren Karangasem Paciran, serta Kiai-Kiai Sepuh NU di wilayah Lamongan.

4. **Intervensi dan Sentralisasi Keputusan DPP (Formal):** Meskipun penjangkaran dimulai dari daerah, hak prerogatif penerbitan formulir model B.Pencalonan-Parpol-KWK (rekomendasi final) berada mutlak di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing partai di Jakarta. Dinamika koalisi nasional (Koalisi Indonesia Maju/KIM vs Non-KIM) turut mengintervensi, meskipun dalam kasus Lamongan terjadi deviasi lokal yang sangat cair. Meskipun proses bottom-up terjadi di daerah melalui penjangkaran, hak prerogatif dan legalitas pendaftaran ke KPU sepenuhnya berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai di Jakarta. Penandatanganan formulir persetujuan B.Pencalonan-Parpol-KWK sering kali diwarnai intervensi kepengurusan pusat, dinamika rekomendasi KIM pusat, dan pertimbangan geopolitik nasional.

Aktor Eksekutor: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parpol di Jakarta.

Kasus Empiris: Penerbitan SK B1-KWK oleh DPP masing-masing partai, serta perpecahan internal KIM di mana PSI dan Demokrat di tingkat pusat memberi keputusan berbeda yang mengarahkan mereka mendukung poros tandingan (KLB) bersama PKB.

Tabel 5.1 Tabel Mekanisme Pembentukan Koalisi: Formal dan Informal

Dimensi Analisis	Kubu Kalah (Ghofur - Firohati)	Kubu Pemenang (Yuhronur - Dirham)
Proses Awal & Inisiasi	Diinisiasi oleh internal partai (PKB) yang mengkristal menjadi koalisi ramping bersama Demokrat dan PSI. Kandidat figur ditentukan terlebih dahulu sebelum koalisi resmi dikunci.	Dilakukan secara inklusif melalui penjangkaran formal, penyamaan visi-misi, serta kalkulasi strategis arah pembangunan daerah jangka panjang.
Pertimbangan Utama	Melengkapi basis massa (kultural NU/PKB, nasionalis Demokrat, dan milenial PSI) serta pemenuhan kursi parlemen. PSI menekankan faktor kedekatan elit pusat.	Berorientasi pada aspek <i>'Play to Win'</i> dengan indikator utama elektabilitas hasil survei, rekam jejak kepemimpinan nyata, dan kedekatan historis.
Pembagian Peran & Manajemen	Pembagian fungsional (PKB dominan di administrasi/LO, Demokrat sasar nasionalis, PSI sasar anak muda). Namun, PSI mengevaluasi adanya dominasi partai besar sehingga struktur bawah diabaikan.	Pembagian peran kolektif-proporsional tanpa diskriminasi size partai. Struktur taktis diisi lintas parpol (Ketua dari Gerindra, Sekretaris dari PDI-P, Bendahara dari Golkar).

Analisis empiris menunjukkan bahwa mekanisme politik dalam proses penentuan calon kepala daerah di Lamongan melalui mekanisme penjangkaran lokal, Diplomasi warung kopi, sowan Masyayikh dan melalui sentralisasi DPP, agar dapat memudahkan terkait empat hal tersebut penulis membuat table :

Tabel 5.2 Tabel Matriks Analisis Empiris Mekanisme Politik

Mekanisme Politik	Karakteristik & Sifat	Aktor Pelaksana	Contoh Kasus Empiris di Lapangan
Penjaringan Lokal	Formal - Prosedural (Bottom-Up)	Desk Pilkada DPC/DPD Parpol Lamongan	Pendaftaran resmi petahana Yuhronur Efendi & Abdul Ghofur di seluruh DPC parpol Lamongan.
Diplomasi Warung Kopi	Informal - Taktis (Peer-to-Peer)	Ketua DPC/DPD Parpol & Elite Lokal	Lobi kafe/warung kopi untuk pembagian posisi tim pemenang KLM (Gerindra, PDIP, Golkar) & cost-sharing.
Sowan Masyayikh	Informal - Kultural (Sosiologis)	Pasangan Calon & Elite Parpol	Sowan ke Kiai Sepuh NU & Ponpes Sunan Drajat & Karangasem Paciran untuk jaminan restu moral.
Sentralisasi DPP	Formal - Legalisator (Top-Down)	Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jakarta	Penerbitan SK B1-KWK resmi oleh DPP; instruksi koalisi pusat serta dinamika pemicu PSI/Demokrat gabung KLB.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terbentuk di tingkat nasional pada Pilpres 2024 mengalami penyesuaian dinamis saat diturunkan ke tingkat Pilkada Kabupaten Lamongan. Penyesuaian ini menghasilkan dua fenomena utama: konsolidasi mayoritas partai KIM mendukung petahana dan fragmentasi taktis sebagian partai KIM ke poros penantang.

Poros KLM dipimpin oleh pasangan petahana Yuhronur Efendi - Dirham Aksara. Poros ini berhasil menyatukan inti utama kekuatan KIM (Gerindra, Golkar,

PAN, PKS) dan memperluas jaringan dengan menggandeng PDI Perjuangan serta PPP Untuk menghindari kanibalisme politik antar-mesin partai pengusung yang sangat besar, KLM menerapkan pembagian wilayah kerja kampanye Strategi Kapling Teritorial (Territorial Assignment): PAN dan Golkar mengamankan wilayah Pesisir Utara (Paciran & Brondong) yang merupakan basis Muhammadiyah dan pesisir. Gerindra dan PPP menggarap wilayah Pedalaman Tengah dan Selatan. PDI Perjuangan dan PKS memfokuskan penetrasi pada kawasan Urban/Kota.

Poros KLB dipimpin oleh Abdul Ghofur (Ketua DPC PKB / Ketua DPRD) berpasangan dengan Firosha Shalati (Kader PSI). Poros ini mewakili fenomena fragmentasi lokal KIM, di mana PSI (anggota inti KIM) dan Demokrat memilih berkoalisi dengan PKB untuk melawan petahana. Poros KLB mengandalkan jaringan kultural Nahdlatul Ulama (NU) dan Kiai Kampung hingga tingkat anak ranting desa untuk mengonsolidasi pemilih tradisional. Gerilya Kultural / *Green Base Consensus*: Mengangkat isu-isu krusial seperti kelangkaan pupuk bagi petani pedalaman serta mengevaluasi efektivitas program infrastruktur 'Jamula' (Jalan Mulus Lamongan) milik petahana. Narasi Defisit Pembangunan:

5.1.3 Faktor-Faktor Determinan di Balik Keputusan Berkoalisi

Dengan mengacu pada tipologi perilaku partai politik yang dikembangkan oleh Kaare Strom, keputusan parpol di Lamongan untuk bergabung dengan salah satu poros koalisi dipengaruhi oleh tiga faktor determinan utama:

1. **Motivasi Berburu Kekuasaan (Office-Seeking Behavior):** Faktor ini sangat dominan pada Poros Koalisi Lamongan Megilan (KLM) yang mengukung petahana Yuhronur Efendi. Partai-partai menengah dan kecil rasional untuk merapat ke petahana karena memiliki probabilitas kemenangan (probability of winning) yang lebih terukur berdasarkan kalkulasi popularitas dan akses kontrol terhadap sumber daya birokrasi. Insentif berupa jaminan alokasi kursi birokrasi, posisi strategis di parlemen daerah, dan keterlibatan dalam program pembangunan daerah menjadi kompensasi utama dari perilaku office-seeking ini.
2. **Motivasi Berburu Suara dan Konsolidasi Kultural (Vote-Seeking Behavior):** Faktor ini menjadi motor penggerak utama bagi Poros Koalisi Lamongan Bagus (KLB). PKB sebagai pemenang Pileg lokal (22,94% suara) menyadari bahwa modal kursi parlemen saja tidak cukup untuk memenangkan eksekutif. Oleh sebab itu, mereka berkoalisi taktis dengan Partai Demokrat dan PSI untuk memperluas jangkauan elektoral ke pemilih nasionalis-urban serta generasi muda. Di sisi lain, bergabungnya Partai Demokrat di poros ini didorong oleh kalkulasi pemaksimalan suara di basis-basis tradisional mereka yang berseberangan secara taktis dengan inkumben.
3. **Kompatibilitas Logistik dan Sumber Daya (Resource-Based Factor):** Pilkada langsung di Lamongan membutuhkan kapitalisasi logistik yang sangat masif untuk membiayai saksi di ribuan TPS, alat peraga kampanye, dan operasional relawan. Keputusan pembentukan koalisi biner ini didikte oleh kesepakatan pembagian beban finansial (cost-sharing) antara figur pasangan

calon dengan konsorsium partai pengusung. Logika pemenuhan logistik ini menyingkirkan sekat-sekat ideologi tradisional (seperti sekat antara parpol Islam dan parpol Nasionalis), sehingga menciptakan aliansi pragmatis demi efisiensi biaya politik.

5.2 Strategi Pemenangan Partai Politik dan Korelasinya dengan Dinamika Koalisi

Dinamika koalisi yang terbentuk—yaitu model (*Big-Tent Coalition*) (Koalisi Gemuk) pada poros KLM versus (*Concentrated Coalition*) (Koalisi Ramping Terkonsentrasi) pada poros KLB—secara langsung mendikte arsitektur dan operasionalisasi strategi pemenangan kedua belah pihak di lapangan.

5.2.1 Strategi Pemenangan Poros Koalisi Lamongan Megilan (KLM) - Pasangan Petahana

Poros KLM yang mengusung pasangan Yuhronur Efendi - Dirham Aksara menerapkan strategi pemenangan berbasis (Defensive-Hegemonic Marketing) dengan memanfaatkan keunggulan struktural dan jumlah parpol pendukung yang masif. Strategi mereka bertumpu pada lima pilar utama:

- 1. Kapitalisasi Jaringan Birokrasi dan Keuntungan Inkumben (*Incumbency Advantage*):** Poros KLM memanfaatkan rekam jejak keberhasilan program kerja petahana (seperti program infrastruktur JAMULA - Jalan Mantap dan Alus Lamongan). Secara implisit, kekuatan jaringan aparatur sipil dan struktur pemerintahan dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kepala desa

dimobilisasi secara taktis untuk menjaga loyalitas basis pemilih tradisional (*paternalistik*).

Analisis Konseptual: Poros KLM memanfaatkan rekam jejak keberhasilan program kerja petahana untuk menjaga loyalitas basis pemilih tradisional (*paternalistik*).

Eksekusi Riil Lapangan: Di lapangan, saat meresmikan perbaikan jalan kabupaten di wilayah Tikung atau Karanggeneng melalui program JAMULA (Jalan Mantap dan Alus Lamongan), Yuhronur (Pak Yes) hadir tidak hanya dalam kapasitas politis, tetapi didampingi oleh dinas terkait, camat, hingga kepala desa setempat. Di tingkat desa, jaringan persatuan kepala desa (PKD) atau LKD yang dekat dengan birokrasi dimanfaatkan secara halus. Pembagian bantuan sosial (*bansos*), insentif RT/RW, atau hibah keagamaan disalurkan menjelang masa kampanye dengan narasi: 'Ini bukti kerja nyata yang harus dilanjutkan, jangan spekulasi pilih yang belum teruji.

2. **Strategi Kapling Wilayah Elektoral (*Territorial Division*):** Dengan sokongan 9 partai politik parlemen, KLM menerapkan strategi pembagian kerja teritorial yang ketat. Wilayah pesisir utara (Paciran, Brondong) dikapling menjadi tanggung jawab mobilisasi Partai Golkar dan PAN yang memiliki akar kultural kuat di sana. Wilayah pedalaman agraris tengah-selatan diserahkan kepada Gerindra dan PPP, sedangkan klaster urban dikelola bersama oleh PDI Perjuangan dan PKS. Strategi ini meminimalkan kanibalisme suara internal koalisi dan memastikan seluruh wilayah administrasi tersaturasi oleh mesin parpol.

Analisis Konseptual: Dengan sokongan 9 partai politik parlemen, KLM menerapkan pembagian kerja teritorial yang ketat untuk meminimalkan kanibalisme suara internal dan memastikan seluruh wilayah administrasi tersaturasi oleh mesin parpol.

Eksekusi Riil Lapangan: Wilayah Pantura (Paciran, Brondong) dikapling menjadi tanggung jawab mobilisasi Partai Golkar dan PAN yang memiliki akar kultural kuat di kalangan Muhammadiyah dan nelayan. Wilayah pedalaman agraris tengah-selatan (Sugio, Sambeng, Ngimbang) diserahkan kepada Gerindra dan PPP untuk menyisir petani gurem melalui pengawalan bantuan alsintan. Sementara itu, klaster urban (Kecamatan Lamongan Kota) dikelola bersama oleh PDI Perjuangan dan PKS menyisir kawasan pemukiman, pertokoan, serta ASN non-struktural.

3. **Kampanye Udara yang Masif (*Air Campaign*):** Menggunakan narasi keberlanjutan pembangunan (*continuity*), KLM mendominasi ruang digital dan media luar ruang di 27 kecamatan. Kehadiran Dirham Aksara sebagai representasi figur muda juga digunakan secara taktis untuk mengikis citra kaku birokrasi petahana guna merangkul segmentasi pemilih pemula.
4. **Pendekatan Komunitas (*Community Approach*)** Pendekatan Komunitas (*Community Approach*) merupakan strategi kampanye yang dilakukan koalisi Lamongan Megilan (KLM) dengan memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk berdasarkan kesamaan profesi, kepentingan, atau latar belakang. Kelompok tersebut dapat berupa komunitas nelayan, pedagang pasar, KLM, serta relawan partai yang tergabung dalam koalisi. Melalui

pendekatan ini, tim kampanye menyampaikan visi, misi, dan program calon secara langsung kepada anggota komunitas. Strategi ini dinilai lebih efektif karena pesan kampanye dapat disampaikan secara lebih terarah, mudah dipahami, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing kelompok masyarakat.

Eksekusi lapangan, Relawan KLM melakukan pendekatan langsung kepada komunitas kelompok masyarakat, khususnya komunitas nelayan di Paciran serta para komunitas pelaku UMKM. Melalui komunikasi yang bersifat persuasif, relawan menyampaikan pentingnya melanjutkan berbagai program berkelanjutan yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendekatan tersebut memperoleh respons yang positif, ditunjukkan dengan antusiasme para pelaku usaha dan komunitas.

5. **Pendekatan Hobi Generasi Z (*Gen Z Hobby-Centric Approach*)** merupakan strategi kampanye yang memanfaatkan minat dan kegemaran generasi muda sebagai ruang untuk membangun keterlibatan. Pendekatan ini dipandang lebih relevan dibandingkan kegiatan formal yang hanya dilakukan di dalam ruangan, karena Generasi Z cenderung menyukai aktivitas yang interaktif, kreatif, dan sesuai dengan ketertarikan mereka. Dalam era digital 4.0 dan 5.0, penyaluran hobi dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjalin kedekatan dengan Generasi Z. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan musik K-pop, olahraga, gim, seni, konten digital, maupun bidang kreatif lainnya dapat dimanfaatkan sebagai media penyampaian aspirasi, gagasan, serta program secara lebih menarik dan mudah diterima.

Analisis Konseptual: Menggunakan narasi keberlanjutan pembangunan yang dipadukan dengan kehadiran cawabup muda (Dirham Aksara) sebagai representasi figur millennial/Gen Z guna mengikis citra kaku birokrasi petahana.

Eksekusi Riil Lapangan: Mas Mas Dirham bertindak sebagai ice breaker dengan menyelenggarakan Lamongan Esports Championship (Mobile Legends/Free Fire), kompetisi skateboarding, serta K-Pop Dance Cover & Live Music Festival di kafe-kafe hits Lamongan Kota. Di sela acara, Dirham nongkrong santai tanpa atribut partai yang kaku, membagikan akses co-working space gratis, serta berdiskusi mengenai creative hub anak muda.

5.2.2 Strategi Pemenangan Poros Koalisi Lamongan Bagus (KLB) - Poros Penantang

Sebaliknya, Poros KLB yang mengusung Abdul Ghofur - Firosha Shalati menerapkan strategi (*Offensive-Guerilla Marketing*) yang bertumpu pada soliditas barisan struktural-kultural dan narasi perubahan. Strategi mereka dirumuskan sebagai berikut:

1. Mobilisasi Loyalitas Kultural Komunitas Hijau (*Green Base Consensus*):

Sebagai basis utama, KLB mengeksploitasi ikatan emosional pemilih tradisional Nahdlatul Ulama (NU) yang melekat kuat pada PKB. Strategi ini digerakkan melalui instruksi struktur partai hingga tingkat anak ranting (desa) dan keterlibatan aktif para Kiai kampung. Pendekatan berbasis jamaah dan

pengajian menjadi instrumen utama pemadatan suara untuk mengimbangi tekanan birokrasi dari kubu petahana.

Analisis Konseptual: Mengembangkan ikatan emosional pemilih tradisional Nahdlatul Ulama (NU) yang melekat kuat pada PKB melalui instruksi struktur partai hingga tingkat ranting dan keterlibatan aktif Kiai kampung.

Eksekusi Riil Lapangan: H. Ghofur bergerak dari musholla ke musholla, pengajian rutin Muslimat/Fatayat, serta sowan ke para Kiai Khos hingga pengasuh TPQ. Diksi yang digunakan sangat emosional dan berbasis kultural: 'Wayah kader NU memimpin Lamongan' untuk memadati (solidify) basis suara tradisional agar tidak terpengaruh oleh intervensi aparat desa.

2. **Eksplotasi Isu Defisit Pembangunan (*Change-Oriented Campaign*):** KLB secara agresif menyerang titik lemah petahana, terutama terkait isu jalan rusak yang belum tersentuh program JAMULA di wilayah pedalaman, masalah kelangkaan pupuk bagi petani tengah-selatan, serta fluktuasi harga tangkapan nelayan pesisir. Mengusung jargon "Lamongan Bagus" (Jalan Alus, Ekonomi Mulus), mereka berhasil mentransformasikan ketidakpuasan sosial menjadi insentif elektoral.

Analisis Konseptual: KLB secara agresif menyerang titik lemah petahana terkait infrastruktur jalan rusak, kelangkaan pupuk bagi petani, dan fluktuasi harga tangkapan nelayan dengan mengusung jargon 'Lamongan Bagus' (Jalan Alus, Ekonomi Mulus).

Eksekusi Riil Lapangan: Ghofur mendatangi langsung kelompok tani di wilayah Selatan yang menjerit karena kelangkaan pupuk subsidi, lalu membuat penandatanganan kontrak politik lokal. Sementara itu, tim PSI dan relawan muda KLB memproduksi video jalan rusak di pedalaman (seperti Sukorame/Bluluk) yang ditanam pohon pisang atau dipakai mancing warga, lalu diunggah ke TikTok/Instagram dengan narasi sarkastik: 'Tki JAMULA (Jalan Mantap dan Alus) opo Jalan Remak & Babak Belur?'

3. **Gerakan Gerilya Lapangan yang Fleksibel (*Ground Campaign*):** Karena jumlah parpol pendukung lebih sedikit, rantai komando KLB jauh lebih pendek dan lincah. Mereka menerapkan strategi gerilya ketuk pintu (*door-to-door campaignz*) yang intensif oleh kader PKB dan Demokrat, dipadukan dengan penetrasi media sosial yang kreatif oleh PSI untuk menyasar pemilih muda urban.

Analisis Konseptual: Karena jumlah parpol pendukung lebih sedikit (3 Parpol: PKB, Demokrat, PSI), rantai komando KLB jauh lebih pendek, fleksibel, dan memiliki biaya koordinasi (transaction cost) yang rendah.

Eksekusi Riil Lapangan: Kader PKB dan Demokrat melakukan gerakan ketuk pintu (door-to-door) pada malam hari. Mereka membawa stiker, kalender, dan bahan kampanye langsung ke rumah-rumah warga petani dan nelayan, mendengarkan keluhan langsung tanpa sekat protokoler acara formal.

4. **Pendekatan terhadap petani sawah, petani tambak, dan nelayan (*Approach to Rice Farmers, Fishpond Farmers, and Fishermen*)** dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masyarakat di setiap

wilayah Kabupaten Lamongan. Sebagai antitesis terhadap Koalisi Lamongan Megilan, Koalisi Lamongan Bagus menerapkan strategi berbasis pembagian wilayah agar program dan komunikasi yang disampaikan lebih tepat sasaran. Wilayah Lamongan Selatan difokuskan pada isu pertanian sawah, terutama terkait ketersediaan dan kelancaran distribusi pupuk. Lamongan Tengah diarahkan pada perhatian terhadap kebutuhan petani tambak, sedangkan Lamongan Pantura diprioritaskan melalui pendekatan kepada masyarakat nelayan. Dengan strategi tersebut, setiap wilayah memperoleh perhatian sesuai dengan potensi ekonomi dan persoalan yang dihadapi masyarakat setempat.

Eksekusi ril relawan Koalisi Lamongan Bagus (KLB) melakukan dialog dengan petani tambak, petani sawah dan nelayan dengan membawa slogan sudah saatnya ada perubahan, sudah saatnya tidak ada lagi kelangkaan pupuk. KLB juga menekankan pentingnya pembangunan dan pemeliharaan jalan yang belum bagus menjadi bagus bagi para petani sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Bagi KLB Akses jalan yang baik menuju area persawahan maupun tambak dinilai dapat memperlancar mobilitas petani.

5. **Pendekatan Generasi Z (*Gen Z Hobby-Centric Approach*)** tidak hanya dilakukan oleh Koalisi Lamongan Megilan (KLM), tetapi juga oleh Koalisi Lamongan Bagus (KLB). KLB membangun komunikasi dengan komunitas Generasi Z melalui kegiatan yang relevan dengan minat, kebiasaan, dan ruang interaksi mereka. Salah satu fokus utama pendekatan tersebut adalah penguatan kesadaran akan pentingnya perubahan. Melalui komunikasi yang sesuai dengan

karakter Generasi Z, KLB mendorong generasi muda untuk memahami pentingnya perubahan dengan mawadahi minat bakat anak muda sesuai *passion* mereka sebagai bekal dalam meningkatkan kualitas diri dan masa depan.

5.2.3 Dialektika Antara Strategi Pemenangan dan Konfigurasi Koalisi

Terdapat korelasi fungsional yang kuat antara jumlah anggota koalisi dengan efisiensi eksekusi strategi pemenangan di Lamongan. Koalisi Gemuk KLM (9 Parpol) memberikan keuntungan berupa legitimasi politik yang sangat besar dan saturasi ruang publik yang nyaris mutlak. Semakin luas jaringan partai politik yang tergabung dalam koalisi, semakin besar pula kapasitas mobilisasi sumber daya, koordinasi organisasi, dan jangkauan kampanye hingga tingkat akar rumput. Kondisi tersebut memungkinkan distribusi peran yang lebih efektif antarpol, memperkuat konsolidasi mesin politik, serta meningkatkan kemampuan koalisi dalam menjangkau berbagai segmen pemilih secara lebih sistematis dan terstruktur.

Namun, kelemahannya terletak pada tingginya biaya koordinasi (*transaction cost*) antar-elite parpol dan munculnya gejala pembonceng gratis (*free-rider*) di mana beberapa parpol non-parlemen atau parpol kecil tidak bergerak maksimal di lapangan karena merasa kemenangan sudah dijamin oleh parpol besar lainnya.

Sebaliknya, Koalisi Ramping KLB (3 Parpol) memiliki tingkat soliditas dan kepatuhan komando yang jauh lebih tinggi. Pembagian logistik kampanye menjadi lebih terkonsentrasi pada zona-zona pertempuran krusial (*battleground districts*).

Namun, kelemahan inheren dari koalisi ramping ini adalah keterbatasan jangkauan struktural, sehingga ketika mesin PKB dan Demokrat mengalami kelelahan di fase akhir kampanye, mereka kekurangan lapis kedua untuk menandingi gempuran multi-mesin yang dimiliki oleh poros KLM.

Hasil akhir Pilkada (KLM unggul dengan 55,46% melawan KLB 44,54%) mengonfirmasi bahwa dalam konstelasi politik lokal di Lamongan, strategi defensif berbasis penguasaan jaringan birokrasi yang ditopang oleh aliansi kartel parpol (koalisi gemuk) masih lebih efektif untuk meredam gelombang tuntutan perubahan yang digerakkan oleh koalisi ramping berbasis massa kultural.

Terdapat korelasi fungsional yang kuat antara jumlah anggota koalisi dengan efisiensi eksekusi strategi kemenangan di lapangan. Berikut adalah perbandingan komparatif dari kedua poros:

Tabel 5.3 Tabel Komparasi Dialektika Strategi dan Konfigurasi Koalisi

Parameter Perbandingan	Poros KLM (Petahana)	Poros KLB (Penantang)
Model Koalisi	Big-Tent Coalition (Koalisi Gemuk - 9 Parpol)	Concentrated Coalition (Koalisi Ramping - 3 Parpol)
Model Marketing	Defensive-Hegemonic Marketing	Offensive-Guerilla Marketing
Kekuatan Utama	Saturasi ruang publik, akses birokrasi, logistik masif	Soliditas komando, ikatan emosional NU, narasi perubahan
Kelemahan Inheren	Transaction cost tinggi, potensi free-rider antar-parpol	Keterbatasan jangkauan mesin cadangan (second-liner)

Parameter Perbandingan	Poros KLM (Petahana)	Poros KLB (Penantang)
Penetrasi Lapangan	Panggung besar, jalan sehat berhadiah, festival UMKM/K-Pop	Pengajian, cangkrukan warung kopi, konsolidasi ranting, sowan kiai
Hasil Perolehan Suara	55,46% (MENANG)	44,54%

5.3 Kampanye Politik dan Pertarungan Narasi di Ruang Publik

5.3.1 Dualisme Narasi: Kontinuitas vs. Perubahan

Dinamika wacana dalam Pilkada Lamongan 2024 terpolarisasi secara diametral ke dalam dua poros utama: narasi stabilitas-keberlanjutan yang diusung oleh Koalisi Lamongan Megilan (KLM) sebagai representasi petahana, dan narasi penyegaran-perubahan oleh Koalisi Lamongan Bagus (KLB) selaku penantang.

Strategi KLM: Sukses mengonsolidasi basis pemilih risk-averse (enggan mengambil risiko), terutama di sektor pedesaan dan aparatur sipil. KLM membingkai petahana sebagai simbol kepastian pembangunan yang telah berjalan, mengkapitalisasi capaian infrastruktur, serta memitigasi isu kegagalan dengan retorika "menuntaskan yang belum selesai".

Strategi KLB: Membidik ceruk pemilih yang mengalami frustrasi sosial ekonomi (social resentment), seperti kelompok pemuda, petani yang terdampak kelangkaan pupuk, serta masyarakat urban pinggiran. Narasi perubahan yang diusung mengeksploitasi celah performa birokrasi petahana, menjanjikan redistribusi

kesejahteraan yang lebih adil, dan pembenahan tata kelola pemerintahan yang dianggap stagnan.

5.3.2 Kampanye Akbar dan Kampanye Melalui Sepanduk/Baliho

Koalisi Lamongan Bagus (KLB) melaksanakan kampanye akbar di Kecamatan Paciran dan Koalisi Lamongan Megilan (KLM) melaksanakan kampanye akbar Lamongan Kota,



Gambar 5.1 Gambar Baliho Paslon Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Mereka juga melakukan kampanye melalui Baliho di hampir setiap di Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan, Berikut contoh gambar kampanye melalui sepanduk atau Baliho:



Gambar 5.2 Gambar Baliho Paslon Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2024

5.3.3 Instrumentalisasi Media Sosial dan Digital Populism

Ruang siber, khususnya platform TikTok, Instagram, dan Facebook, tidak lagi sekadar menjadi media sosialisasi searah, melainkan medan tempur asimetris untuk memperebutkan hegemoni opini publik.

Poros KLB (Digital Populism): Menampilkan keunggulan taktis dalam mengadopsi gaya populisme digital. Mereka memproduksi konten-konten yang bersifat emosional, menggunakan bahasa lokal (Cak/Ning), serta memanfaatkan algoritma tren video pendek untuk mendemistifikasi wibawa petahana. KLB memosisikan kandidatnya sebagai "bagian dari rakyat yang terabaikan", menciptakan kesan organik, meskipun digerakkan oleh jaringan pembuat konten profesional.

Poros KLM (Structured Management): Merespons dengan manajemen konten yang jauh lebih rigid, terstruktur, dan formal. Menggunakan agensi komunikasi politik, KLM membanjiri ruang digital dengan infografis capaian kinerja, pelurusan disinformasi (counter-hoax), serta estetika visual yang mencerminkan kewibawaan institusional (state-backed aesthetic). Kampanye siber KLM didesain untuk menciptakan impresi kompetensi dan kepemimpinan yang matang.

5.3.4 Patronase dan Realitas Clientelism

Meskipun terdapat lompatan kecanggihan kosmetik dalam kampanye digital, realitas sosiologis pemilih Lamongan menunjukkan bahwa cyber war (perang siber) hanyalah suplemen pemanis dari ground war (perang darat) yang berbasis pada relasi patronase tradisional. Budaya politik lokal masih menempatkan insentif material langsung sebagai determinan elektoral utama. Praktik clientelism bermanifestasi dalam dua bentuk:

1. **Patronase Relasional:** Mobilisasi suara melalui tokoh kunci (kiai lokal, kepala desa, ketua kelompok tani) yang diikat oleh komitmen bantuan modal, hibah rumah ibadah, atau jaminan proyek desa.
2. **Klientalisme Transaksional:** Distribusi komoditas menjelang hari H (pembagian sembako, dan bantuan sosial informal). Logika pemilih yang pragmatis memandang pemilu sebagai momentum redistribusi bantuan jangka pendek, sehingga efektivitas narasi digital kerap kali gugur jika tidak diamankan oleh jaringan distribusi bantuan logistik di level akar rumput.

5.4 Dinamika Internal Koalisi: Soliditas vs. Friksi Kepentingan

5.4.1 Collective Action Problem dalam Koalisi Gemuk (KLM)

Pembentukan koalisi besar oleh KLM melahirkan konsekuensi sosiologi organisasi yang pelik, yakni munculnya collective action problem (masalah aksi bersama) berupa fenomena free-rider (penumpang gelap). Partai-partai politik kecil yang bergabung dalam gerbong petahana cenderung bersikap pasif dalam kerja-kerja pemenangan lapangan, dengan asumsi bahwa figur petahana dan partai-partai besar sekutunya akan menanggung beban elektoral terbesar. Untuk memitigasi kelompokan mesin partai ini, elite KLM menggunakan instrumen pembagian kekuasaan (power-sharing) di awal. Janji-janji alokasi kursi birokrasi, penempatan strategis di legislatif, hingga komitmen distribusi proyek APBD pada tahun anggaran berikutnya menjadi "lem perekat" yang menjaga agar partai-partai penyokong tetap bergerak.

5.4.2 Tantangan Kohesi: Instruksi Pusat vs. Realitas Daerah

Ketidakselarasan (mismatch) antara keputusan tingkat pusat (DPP) dengan kalkulasi taktis pengurus cabang di daerah (DPC/DPD) menjadi sumber friksi internal yang nyata di kedua poros.

Anomali Rekomendasi: Elite pusat partai kerap kali menurunkan rekomendasi dukungan berdasarkan mahar politik atau kesepakatan makro-nasional yang tidak linier dengan realitas sosiologis di Lamongan.

Pembangangan Senyap (Silent Defection): Di tingkat akar rumput, ditemukan struktur partai tingkat kecamatan atau desa yang secara formal wajib memenangkan calon A, namun secara kultural mendukung calon B karena kedekatan primordial atau kekecewaan emosional. Friksi ini menciptakan "keretakan tak terlihat" (invisible cracks) yang melemahkan daya gempur koalisi.

5.4.3 Mitigasi Konflik Internal dan Pembagian Power-Sharing

Kedua kubu mengadopsi model manajemen konflik yang berbeda demi mengamankan stabilitas internal selama masa kritis kampanye:

Tabel 5.4 Tabel Mitigasi Konflik Internal dan Pembagian Power Sharing Calon

Karakteristik Mitigasi	Poros KLM (Petahana)	Poros KLB (Penantang)
Model Komando	Sentralistik-Birokratis	Konsensual-Egaliter
Instrumen Perekat	Jaminan kesinambungan akses APBD dan jabatan pasca-pelantikan	Pembagian portofolio konsesi politik jangka panjang di awal
Resolusi Konflik	Pendekatan top-down (perintah DPP untuk mendisiplinkan kader yang membelot)	Musyawarah intensif antarpimpinan partai demi menjaga psikologi kesetaraan

5.5 Sintesis Analisis: Konvergensi Strategi dan Realitas Kartel Politik

Pilkada Lamongan 2024 menyajikan visualisasi gamblang dari apa yang disebut sebagai "Paradoks Demokrasi Lokal". Di satu sisi, institusi demokrasi prosedural berjalan semakin modern, ditandai dengan penetrasi media sosial yang masif dan adopsi konsultan politik profesional. Namun di sisi lain, substansi

demokrasi justru mengalami regresi ke arah kartelisasi politik, di mana partai politik tidak lagi berfungsi sebagai kanal ideologi, melainkan berubah fungsi menjadi instrumen pragmatis pemeliharaan akses kekuasaan (power-preservation instrument).

Konvergensi strategi antara koalisi yang bertarung menunjukkan bahwa perbedaan ideologis semakin tidak menjadi pembeda utama dalam kontestasi politik lokal. Kedua kubu cenderung menggunakan pola yang sama, yaitu memperkuat jaringan sosial, membangun kedekatan dengan kelompok masyarakat, memanfaatkan media digital, serta mengangkat isu-isu yang relevan dengan kebutuhan pemilih. Perbedaan strategi lebih tampak pada cara mengelola sumber daya politik dan menentukan sasaran kelompok pemilih daripada pada perbedaan gagasan yang mendasar.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kompetisi dalam Pilkada Lamongan 2024 berlangsung dalam ruang politik yang semakin pragmatis. Partai politik memusatkan perhatian pada pembentukan koalisi, penguatan figur kandidat, dan penguasaan jaringan dukungan sebagai instrumen untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, demokrasi lokal berisiko kehilangan fungsi substantifnya sebagai arena pertarungan gagasan, karena orientasi utama partai lebih diarahkan pada kalkulasi kemenangan elektora.

Keunggulan petahana dalam KLM tidak murni lahir dari kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan, melainkan hasil dari keberhasilan mengintegrasikan instrumen birokrasi (dari tingkat dinas hingga perangkat desa) ke dalam struktur

mesin kemenangan formal. Sebaliknya, KLB dengan narasi perubahannya pada akhirnya harus tunduk pada hukum pasar pemilu lokal yang berbiaya tinggi: mereka terpaksa mereplikasi metode patronase tradisional (politik logistik dan insentif material) untuk mengimbangi dominasi petahana. Akibatnya, terjadi konvergensi strategi; pada titik kulminasi pemilu, perbedaan ideologis antara "Kontinuitas" dan "Perubahan" melebur ke dalam pola tunggal, yaitu pertarungan likuiditas logistik dan kekuatan jaringan klientalisme sosiologis.